

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perolehan sertipikat hak milik atas tanah karena peralihan hak (jual beli) di Kota Yogyakarta sudah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum, namun masih ada beberapa kendala berupa perbedaan data para pemohon pendaftaran tanah untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah karena jual beli, yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan kantor kecamatan (Umbulharjo dan Gondokusuman).

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan agar baik Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta maupun kecamatan dapat menjalin kerja sama yang sinergis terutama dalam melakukan pendataan terhadap para pemohon pendaftaran peralihan hak milik atas di Kota Yogyakarta. Selain itu disarankan juga agar pelayanan pengurusan sertipikat dapat diselesaikan seefektif mungkin mengingat pentingnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mendaftarkan tanahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aslan Noor, 2006, *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 1995, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi cetakan ke-6 jilid I, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, edisi revisi cetakan ke-15, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 1986, *Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Dalam Pembangunan*.
- Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- John Salindeho, 1994, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung.
- R. Soeprpto, 1986, *UUPA Dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta.
- Suryono Sukanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

### SKRIPSI

- Ali Udin, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal*, SKRIPSI, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Manajemen Pertanahan Universitas Negeri Semarang, 2005, hlm. 25-26.

Antonius Adityo Ariwibowo,, *Pensertipikatan dan Pembebanan Hak Guna Bangunan atas Tanah di Perumahan Citra Pandawa Asri dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kota Batam, SKRIPSI*, 2009, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

### **WEBSITE**

[http://www.scribd.com/suggested\\_users?from=download&next\\_url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument\\_downloads%2F26826803%3Fextension%3Dpdf%26skip\\_interstitial%3D1true](http://www.scribd.com/suggested_users?from=download&next_url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument_downloads%2F26826803%3Fextension%3Dpdf%26skip_interstitial%3D1true), diakses tanggal 14 Mei 2010, pukul 20.00.

<http://archive.kaskus.us/thread/770887>, diakses pada tanggal 14 Mei 2010, pukul 11.00.

<http://ummu0salman.multiply.com/journal/item/11>, diakses pada tanggal 14 Mei 2010, pukul 12.00.

<http://maspurba.wordpress.com/2008/04/29/kepastian-hukum-atas-sertifikat-tanah-sebagai-bukti-hak-kepemilikan-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2010, pukul 13.00.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997;

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara;

PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998.